

ABSTRAK

Muhammad Fazlur Rahman Azmi (2024) : penelitian ini berjudul “Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yang Berakibat Tindak Pidana Menurut UU Wakaf Dan Kuh Pidana (Studi Kasus Perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb)

Penelitian yang penulis lakukan melatarbelakangi telah terjadi sengketa wakaf di wilayah Bandung antara pihak satu yaitu ahli waris dan pihak dua yaitu nazdir yang didalamnya terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak nazdir. Tindak pidana yang timbul adalah pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf oleh pihak nazdir.

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk Mengetahui dan memahami ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf yang diatur dalam UU Wakaf, 2) Untuk mengetahui dan memahami tindak pidana yang timbul dari pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam Perkara Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 menurut KUH Pidana, 3) Untuk mengetahui dan memahami Putusan Pengadilan PN Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/PnBlb dalam perkara yang dituntut jaksa umum dalam surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018, 4) Untuk mengetahui dan memahami legalitas wakaf dari akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut menurut UU Wakaf.

Kerangka Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan hukum dan teori perbandingan hukum yakni melihat perpespektif antara dua sumber hukum dalam masalah sengketa akta pengganti akta ikrar wakaf yang berakibat tindak pidana.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari bahan pustaka (library research) yang kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai permasalahan akta pengganti akta ikrar wakaf ini adalah sebagai berikut: 1) ketentuan wakaf telah diatur dalam UU Nomor 41 tentang wakaf bahwasanya wajib memenuhi enam unsur wakaf, kepemilikan penuh atas harta benda wakaf, dan syarat administrasi yang lain yang tercantum dalam peraturan perundangan 2) Tindak pidana yang timbul dalam kasus ini adalah bahwasanya pihak nazdir melakukan tindakan pemalsuan terhadap akta pengganti akta ikrar wakaf, 3) Putusan Pengadilan Bale Bandung memutuskan bersalah kepada pihak nazdir karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta pengganti akta ikrar wakaf dan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana 4) Legalitas akta pengganti akta ikrar wakaf tidak sah disebabkan tidak memenuhi syarat, unsur, kepemilikan sah atas harta benda wakaf dan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundangan wakaf.

Kata Kunci : Akta ikrar wakaf, legalitas, peraturan

ABSTRACT

Muhammad Fazlur Rahman Azmi (2024): This research is titled "Substitute Deed of Wakaf Ikrar Resulting in Criminal Acts According to the Wakaf Law and Criminal Code (Case Study of the Decision of the Judge of the District Court of Bale Bandung Number 764/Pid.B/2018/Pnblb)".

The research conducted by the author is motivated by a wakaf dispute in the Bandung area involving two parties: the heirs and the nazir, wherein criminal acts were committed by the nazir. The criminal act in question is the creation of a substitute deed of wakaf ikrar by the nazir.

This research aims to: 1) Understand the provisions regarding the creation of wakaf ikrar deeds and substitute deeds of wakaf ikrar regulated under the Wakaf Law, 2) Examine the criminal implications arising from the creation of Substitute Deeds of Wakaf Ikrar in Case Number REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 according to the Criminal Code, 3) Analyze the Judgment of the District Court of Bale Bandung Number 764/Pid.B/2018/PnBlb in the case prosecuted by the public prosecutor in the letter of demand from the District Prosecutor's Office of Bandung with Number REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018, 4) Evaluate the legality of wakaf from the substitute deed of wakaf ikrar according to the Wakaf Law.

The theoretical framework used in this research includes legal justice theory and comparative law theory, examining perspectives between two legal sources in the dispute over substitute deeds of wakaf ikrar resulting in criminal acts.

The methodology employed is descriptive qualitative research, utilizing library research as the primary source of data which is then analyzed and interpreted.

The findings of this study regarding issues related to substitute deeds of wakaf ikrar are as follows: 1) The provisions of wakaf are regulated under Law Number 41 concerning wakaf, which mandates compliance with six elements of wakaf, full ownership of wakaf assets, and other administrative requirements stipulated in legislation, 2) The criminal act arising in this case is that the nazir falsified the substitute deed of wakaf ikrar, 3) The District Court of Bale Bandung found the nazir guilty of falsifying the substitute deed of wakaf ikrar, meeting the elements of the criminal offense, 4) The legality of the substitute deed of wakaf ikrar is deemed invalid due to non-compliance with requirements, elements, valid ownership of wakaf assets, and administrative prerequisites stipulated in wakaf legislation.

Keywords: Wakaf ikrar deed, legality, regulations